



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
Jl. Alun-alun Utara No. 1 Kajen**

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah ini dapat kami sampaikan kepada Ibu Bupati sebagai pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Isi yang terkandung dalam Laporan Kinerja instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan ini merupakan upaya untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan Instansi Pemerintah, serta dalam rangka perwujudan Good Governance di Kabupaten Pekalongan.

Kami menyadari dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kami menerima saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022, semoga laporan ini bermanfaat.

Kajen, 6 Februari 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**
SETDA
M. YULIAN AMBAR, S.Sos., M.Si
Pegawai Tk. I
NIP. 19750710 199903 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pekalongan secara langsung didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan, secara khusus penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026. Rencana Strategik Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 merupakan kerangka acuan bagi penyusunan rencana kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan yang disusun setiap tahun dengan dukungan dana APBD Kabupaten Pekalongan sekaligus untuk mewujudkan RPJMD Kabupaten Pekalongan.

Semua pelaksanaan pembangunan harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik di jajaran Sekretariat Daerah maupun masyarakat umum. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sebagaimana Instruksi Presiden melalui Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian dipertegas kembali melalui Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Permen PAN dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Pada tahun 2022 yang merupakan tahun pertama dari periode RPJMD 2021 – 2026 ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi pelaksanaan rencana kinerja tahun 2022, Hasil pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 2 (dua) sasaran adalah 99,09 %, secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	(%)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Indeks Reformasi Birokrasi	B (84,91)	B (88)	B (84,91)*	98,35 %
2.		Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B (64,18)	B (65)	B (64,18)*	98,74%
			Tingkat Kematangan Organisasi	S (29,07)	S (32)	S (29,48)	92,13 %
3.		Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten		78	83	106,4 %
Rata - rata							98,09 %

*Data Tahun 2021, LHE Tahun 2022 masih menunggu hasil dari MENPAN RB

Secara keseluruhan, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah menganggarkan kegiatan dengan baik dan relevan dengan dokumen sasaran strategis.

Kajen, 6 Februari 2023



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	1
B. Fungsi Strategis	2
C. Struktur Organisasi Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan	2
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	3
E. Permasalahan Utama yang Dihadapi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	7
B. Perjanjian Kinerja	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Pengukuran Kinerja	17
C. Capaian Indikator Kinerja Utama	19
D. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	20
D. Realisasi Anggaran	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Prestasi yang diraih.....	60
C. Hal – Hal yang Ingin Dicapai Ditahun Mendatan.....	61
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam rangka melaksanakan Otonomi Daerah di Kabupaten Pekalongan perlu penataan organisasi pemerintahan yang baik yaitu organisasi yang efektif dan efisien serta berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat dan dengan mewujudkan aparatur pemerintahan yang produktif, profesional, berkarakter, akuntabel dan dengan dukungan sistem mekanisme kerja yang berdaya guna dan berhasil guna, diyakini mampu mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang baik. Sejalan dengan RPJM Nasional yang pada nilainya menggarisbawahi bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu didukung oleh aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat dengan lebih produktif, profesional, transparan, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna.

Penyelenggaraan pemerintahan adalah salah satu tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, Tugas Sekretaris Daerah adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 merupakan gambaran kinerja Sekretariat Daerah dalam tahun 2022 yang berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 serta RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026, terutama capaian sasaran yang telah ditetapkan.

B. FUNGSI STRATEGIS

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah dimaksud, maka Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan pemerintah Daerah;
2. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. pembinaan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan; dan
 - c) Sub Koordinator Otonomi Daerah Dan Kerjasama.
 2. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Perundang-undangan;
 - b) Sub Koordinator Bantuan Hukum ; dan

- c) Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a) Subkoordinator Bina Mental Spiritual; dan
 - b) Subkoordinator Kesejahteraan Sosial
 - c) Subkoordinator Kesejahteraan Masyarakat.
- c. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan, membawahi:
 - 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD
 - b) Sub Koordinator Perekonomian
 - c) Sub Koordinator Sumber Daya Alam
 - 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Penyusunan Program;
 - b) Sub Koordinator Pengendalian Program; dan
 - c) Sub Koordinator Evaluasi Dan Pelaporan.
 - 3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
 - a) Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b) Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - c) Sub Koordinator Pembinaan dan advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - a) Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
 - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur Dan Kelembagaan.
 - 2. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan; dan
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga dan Peralatan.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Protokol
 - b) Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan
 - c) Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Desember 2022 berjumlah 151 orang, yang terdiri dari 149 Orang ASN dan 2 Orang Non ASN dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai berikut

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah (orang)	Persentase (%)
		L	P	L	P		
1	SD	2	-	-	-	2	1,32%
2	SMP Sederajat	3	-	-	1	4	2,65%
3	SMA Sederajat	30	5	-	-	35	23,18%
4	D3	7	6	-	1	14	9,27%
5	S1	35	41	-	-	76	50,33%
6	S2	13	7	-	-	20	13,25%
7	S3	-	-	-	-	-	-
	Jumlah (orang)	91	58	-	2	151	100%
	Persentase (%)	60,26%	38,41%	-	1,32%	100%	

Sumber : Data Kepegawaian Setda Kab. Pekalongan per 30 Desember 2022

- b. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan di Sekretariat Daerah :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	3	-	3
1	Golongan II	29	8	37
2	Golongan III	44	48	92
3	Golongan IV	15	2	17
	Total	91	58	149

Sumber : Data Kepegawaian Setda Kab. Pekalongan per 30 Desember 2022

- c. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan di Sekretariat Daerah :

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan
di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Eselon II	5	2	7
2	Eselon III	9	-	9
3	Eselon IV	-	4	4
4	JFT	20	15	35

5	Staf	58	38	96
	Total	92	57	149

Sumber : Data Kepegawaian Setda Kab. Pekalongan per 27 Desember 2021

E. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Permasalahan - permasalahan yang dihadapi dan perlu adanya pemecahan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan antara lain :

- a) Kapasitas SDM belum cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah secara Optimal, misalnya, tenaga teknis di bidang perencanaan, tenaga pengkajian di bidang hukum, pengelolaan keuangan/akuntan, analisa jabatan/kepegawaian dan arsiparis.
- b) Adanya regulasi MENPAN baru terkait penyederhanaan birokrasi dengan adanya penyetaraan Jabatan Eselon IV menjadi Jabatan Fungsional mengharuskan melakukan penyesuaian baik nomenkatur maupun tugas fungsi pejabat fungsional hasil penyetaraan.
- c) Harapan masyarakat yang semakin tinggi atas pelayanan yang oleh unit – unit pelayanan sehingga memerlukan inovasi dalam pelayanan.
- d) Perlunya pemahaman yang komprehensif terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi.
- e) Belum optimalnya peran lembaga dalam menyusun kebijakan pemerintah daerah untuk mengantisipasi perubahan, tantangan, peluang dan dinamika pembangunan daerah.
- f) Peran lembaga dalam koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah belum efektif baik antar sektor dan antar fungsi maupun internal dan eksternal
- g) Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan tugas antar Perangkat Daerah
- h) Belum tersedianya pemanfaatan standar operasional monitoring dan evaluasi untuk mendukung pelaksanaan tupoksi
- i) Sinergitas antara penyusunan kebijakan dan pelaksanaan belum optimal
- j) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Sistematika penyajian LKjIP:

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup

Lampiran - lampiran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026, adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2021 – 2026.

Sekretariat Daerah dalam rangka mewujudkan **misi ke-2 RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026** yaitu: **Menciptakan Pemerintahan yang bersih,berwibawa dan inovasi berbasis kemajuan teknologi informasi**, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 - 2026, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Untuk mendukung Program ini, ada 4 Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan
- b. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah
- c. Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- d. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

Untuk mendukung Program ini, ada 4 Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
- b. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
- c. Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
- d. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Untuk mendukung Program ini, ada 11 Kegiatan, yaitu :

- a. Kegiatan Penataan Organisasi
- b. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- h. Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
- i. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- j. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- k. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan strategi merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk rencana induk (*Master Plan*) secara komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif (*Competitive Advantage*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*Competitive Disadvantage*).

Setiap instansi pemerintah diharapkan dapat mengembangkan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudkan suatu pelayanan yang prima. Selanjutnya melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), pihak-pihak yang berkepentingan akan mengetahui keberhasilan atau kegagalan instansi yang bersangkutan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1. Visi

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagai unsur staf Pemerintah Kabupaten harus mampu mempunyai Visi yang mendorong dan merangsang kinerja untuk mewujudkan gambaran masa depan yang diinginkan.

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Orientasi pembangunan Kabupaten Pekalongan lima tahun yang akan datang tertuang dalam visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Visi Kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026 :

” Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (SETARA) dan Berbudaya Gotong royong ”

Tabel 2.1
Penjelasan Visi

UNSUR VISI	PENJELASAN
Sejahtera	<ul style="list-style-type: none">a. Terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan dan papan bagi warga masyarakat Kabupaten Pekalongan;b. Memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadaic. Terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnyad. Penyerapan tenaga kerja dengan penghasilan yang memadaie. Mampu bersaing dan berinovasi dalam dunia perekonomian dengan berbasis penguatan ekonomi kerakyatan yang mandiri.
Adil	<ul style="list-style-type: none">a. Menghilangkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pekalonganb. Menghilangkan ego structuralc. Menghilangkan diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pekalongand. Pelaksanaan segala regulasi dan Perundang-undangan yang berkeadilan

UNSUR VISI	PENJELASAN
Merata	a. Pendistribusian kegiatan pembangunan secara merata disemua wilayah dan sektor atau bagian b. Terpenuhinya infrastruktur publik yang memadai c. Terbukanya konektivitas antar wilayah
Bergotong royong	a. Bahu membahu dalam menyelesaikan masalah dan atau pekerjaan b. Menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas c. Menumbuhkan sikap tolong menolong d. Mempererat tali silaturahmi dan atau persaudaraan e. Meningkatkan rasa solidaritas f. Memperkokoh Persatuan

Sumber : Renstra Setda 2016-2021

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Bupati Dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud diatas, haruslah ditetapkan suatu misi, yaitu sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui penerapan strategi yang dipilih. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan suatu Instansi Pemerintah. Misi adalah tujuan utama kearah mana perencanaan dan program suatu Instansi Pemerintah yang ingin dicapai.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan Kabupaten Pekalongan tahun 2021 - 2026 adalah:

- 1) Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong;
- 2) Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi
- 3) Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal;
- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing berlandaskan nilai-nilai keadilan dan pemerataan
- 5) Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan;

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Pekalongan mengarah pada pencapaian unsur visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah (Setda) yaitu berada pada **misi ke-2 yaitu: Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi.**

3. Tujuan

Tujuan Organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Dalam rangka mencapai misi organisasi, maka perlu disusun tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan periode Renstra 2021 – 2026 yaitu **Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

4. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu 2021 - 2026 yaitu:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Meningkatkan Efektifitas Pelayanan Publik yang Didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai yang dilaksanakan dalam dalam jangka waktu lima tahun kedepan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolak ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 2 : Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, dan Inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi									
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Indeks Reformasi Birokrasi	64,60	B (66)	B (70)	B (71)	BB (73)	BB (74)
		1) Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Nilai SAKIP Kabupaten	64,02	B (65)	B (67)	B (70)	BB (73)	BB (75)
			b. Tingkat Kematangan Organisasi	S (28 – 36)	S (32)	S (34)	S (35)	T (36)	T (37)
		2) Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	76	78	78	79	80	80

Sumber : Renstra Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan 2021 - 2026

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya

terwujud akibat kegiatan tahun - tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah merupakan proses penyusunan rencana kinerja tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Didalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam kurun waktu tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya sasaran – sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2022. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya tujuan strategis Sekretariat Daerah yang akan berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan. Secara singkat Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 secara lengkap disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Sekretariat Daerah Kab. Pekalongan

NO.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2022
1	2	3	4
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Nilai SAKIP Kabupaten	B (65)
		b. Tingkat Kematangan	S (32)

NO.	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun 2022
		Organisasi	
2.	Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung pemanfaatan teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	78

Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah tersebut, maka didukung 3 (Program) sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.878.624.500
2. Program Perekonomian dan Pembangunan, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.552.685.200
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 33.261.527.000

Indikator Kinerja dari 3 (tiga) Program di atas mendukung sasaran Sekretariat Daerah dengan tabel sebagai berikut :

NO.	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program yang mendukung Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022
1	2	3		4
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	a. Nilai SAKIP Kabupaten		B (65)
			Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja	100%
			Prosentase Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100%
			Prosentase Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	100%

NO.	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program yang mendukung Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022
			yang tersusun	
			Prosentase Laporan Penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun secara ketentuan	100%
		b. Tingkat Kematangan Organisasi		S (32)
			Tingkat Kematangan UKPBJ	9 (angka)
			Prosentase Ketersediaan Laporan Kinerja	100 %
2.	Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung pemanfaatan teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten		78
			Prosentase Permohonan Kerjasama sesuai ketentuan yang difasilitasi	100 %
			Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	100 %
			Prosentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai ketentuan	100 %
			Prosentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100 %
			Prosentase Ketersediaan Layanan administrasi Kepegawaian, administrasi Umum	100 %

NO.	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program yang mendukung Sasaran	Target Kinerja Tahun 2022
			dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	
			Prosentase Pengadaan/Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan adalah perwujudan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun pertama perencanaan pada Renstra Tahun 2021 – 2026, sehingga capaian kinerja tahun 2022 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun – tahun sebelumnya.

B. PENGUKURAN KINERJA

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam

pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*). Skala Penilaian dari pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, hasilnya dikategorikan sesuai skala seperti di bawah ini :

- a. Lebih dari 100% Sangat Baik
- b. 75 – 100% Baik
- c. 55 – 74 % Cukup
- d. Kurang dari 55 % Kurang

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam rencana strategis 2021 - 2026, untuk tahun 2022 Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari rencana kinerja tahun 2022 dan perjanjian kinerja Tahun 2022 untuk mencapai target tujuan dan sasaran. Hasil pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 2 (dua) sasaran adalah 96,43 % secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

NO.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2022	(%)
1		2	3		4	5	6
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Indeks Reformasi Birokrasi	B (64,91)	B (66)	B (64,91)*	98,35 %
2.		Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B (64,18)	B (65)	B (64,18)*	98,74%
			Tingkat Kematangan Organisasi	S (29,07)	S (32)	S (29,48)	92,13 %
3.		Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten		78	83	106,4 %
Rata – rata							99,09 %

D. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 masih menunggu pemberitahuan penerimaan hasil dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) sehingga Capaian Kinerja Indikator Tujuan Sekretariat Daerah Tahun 2022 masih menggunakan Skor indeks Reformasi Birokrasi tahun 2021 yaitu sebesar 64,91 dengan kategori Baik. Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2020 yaitu sebesar 0,31 sehingga capaian kinerja indikator Tujuan tahun 2022 adalah sebesar 98,35 % (BAIK)

Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2022 tercermin dalam pencapaian sasaran - sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja dari sasaran ini adalah **Nilai SAKIP Kabupaten** dan **Tingkat Kematangan Organisasi**.

Nilai SAKIP Kabupaten ini adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB) dan Nilai Tingkat Kematangan Organisasi ini diperoleh dari Penilaian Mandiri Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan yang kemudian diverifikasi oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Pada saat penyusunan LKjIP Tahun 2022 ini, Nilai hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Pekalongan Tahun 2022 belum diperoleh karena masih menunggu pemberitahuan penerimaan LHE nilai AKIP sehingga masih menggunakan nilai AKIP Tahun 2021 yaitu B (64,18).

Untuk Nilai Tingkat Kematangan Organisasi Tahun 2022 adalah S (29,48) dari target tahun 2022 yaitu S (32). Secara kategori nilai tingkat kematangan organisasi ini sesuai target yaitu S atau Sedang namun secara angka belum mencapai target yang di inginkan. sehingga secara Capaiannya = 92,13 %.

Rata – Rata Kinerja sasaran ini mencapai = 95,44 %

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA	CAP. TH. 2020	CAP. TH. 2021	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RENSTRA	KET
				TARGET	REALIASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nilai SAKIP Kabupaten	64,02	64,18	B (65)	B (64,18)	98,74 *	BB (75)	Tercapai dengan kategori Baik
2	Tingkat Kematangan	S (28-	29,07	S (32)	S (29,48)	92,13	T (37)	Tercapai dengan

	Organisasi	36)						kategori Baik
Rata – rata					95,44			

Untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja **Nilai SAKIP Kabupaten**, didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100 %	100%	100 %
1.1	Penataan Organisasi	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100 %	100%	100 %
	a. Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan	3 Laporan	100%
	b. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	c. Koordinasi dan Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
1.2.	Perencanaan, Penganggaran dan	Persentase dokumen	100%	100%	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu			
	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	150%
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.	1 Laporan	1 Laporan	100%

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja mencapai 100 %, dengan kegiatan Penataan Organisasi dan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Organisasi dan Bagian Administrasi Pembangunan untuk subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

Dalam rangka Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Bagian Organisasi melakukan Fasilitasi atau pendampingan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPPP) sehingga pada Tahun 2022 ini, Kabupaten Pekalongan berhasil memperoleh Nilai A dengan Predikat Sangat Baik dan masuk dalam kategori Zona hijau dari hasil Penilaian oleh pihak Ombudsman RI.

Pada Tahun 2022 ini, untuk melakukan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Pekalongan, Bagian Organisasi telah menyusun dokumen Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Sekretariat Daerah dan SKM Kabupaten Pekalongan yang bersumber dari survey kepuasan masyarakat pada semua unit pelayanan publik yaitu sejumlah 45 Perangkat Daerah, dokumen SKM ini dikirimkan ke Kementerian PAN RB melalui website *esr.menpan.go.id*.

Bagian Organisasi dalam rangka monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana telah menyusun Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan (Raperbup) tentang Budaya Kerja dan Raperbup tentang Pelayanan Publik.

Dalam mendukung capaian kinerja Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja, telah tersusun dengan baik dan tepat waktu dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah dan LKjIP Kabupaten, Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Perjanjian Kinerja, Dokumen Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Rencana Aksi, Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022 dan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023.

Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini adalah masih terdapat keterlambatan perangkat daerah dalam mengirimkan data dan dokumen yang diminta.

Alternatif solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah melakukan penagihan ke Perangkat Daerah serta jemput bola data yang diminta.

2. Program Perekonomian dan Pembangunan

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	a. Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100%	100%	100%
2.1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase kebijakan perekonomian daerah yang dilakukan monev	100 %	100%	100%
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan	4 Laporan	100%
2.2	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan monev	100%	100%	100%
	a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, UMKM,	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
		Penanaman Modal, Tenaga Kerja			
	b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun, mencapai 100%.

Capaian Program ini didukung oleh Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam yang capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Perekonomian.

Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian yang terdiri dari sub kegiatan:

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini berupa koordinasi dan pembinaan terhadap BUMD dan BLUD, sinkronisasi kegiatan Pemerintah Daerah dengan BUMD dan BLUD serta evaluasi laporan kinerja BUMD dan BLUD. Bagian Perekonomian melakukan pembinaan kepada 4 BUMD yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Kajen, PT. BPR BKK Kabupaten Pekalongan (Perseroda), PT. BPR BKK Jateng (Perseroda) dan Perusahaan Air Minum Daerah "Tirta Kajen" dan 29

BLUD yang terdiri dari 27 Puskesmas se-Kabupaten Pekalongan, RSUD Kajen dan RSUD Kraton.

b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah melaksanakan langkah-langkah pengendalian inflasi daerah, fasilitasi percepatan akses keuangan daerah serta melakukan pengendalian dan distribusi perekonomian.

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

a. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah penyusunan dokumen rencana kegiatan dan program yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), melakukan fasilitasi kesekretariatan DBHCHT Kabupaten Pekalongan, melaksanakan pencarian informasi dan operasi bersama barang kena cukai ilegal dan melakukan evaluasi kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan.

b. Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah menghimpun data penghematan energi se-Kabupaten Pekalongan, melakukan pemantauan terhadap pengadaan dan peredaran pupuk, pestisida dan LPG 3 Kg serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan.

Hambatan yang dilalui dalam pelaksanaan pencapaian indikator adalah terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan dan jumlah personil di Bagian Perekonomian yang masih terbatas.

Alternatif solusi dalam mengatasi hambatan dengan memaksimalkan sumber daya serta mengajukan penambahan personil dan pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan.

No	Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
2.	Program Perekonomian dan Pembangunan	b. Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	100%	100%	100%
2.3.	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Presentase laporan realisasi fisik seluruh OPD	100%	100%	100%
	a. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	b. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan	5 Laporan	100%
		Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Pelaporan (SIMPEL)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun mencapai 100 %.

Capain program ini didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan yang capaian kinerjanya juga mencapai 100%. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Administrasi Pembangunan.

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, terdiri dari subkegiatan:

- a. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan, yaitu menyusun laporan hasil koordinasi dan pengendalian progres kegiatan belanja APBD TA. 2022 dengan mengadakan rapat evaluasi rutin setiap bulannya, dan monitoring lapangan terhadap kegiatan/proyek fisik di Kabupaten Pekalongan
- b. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan yaitu menyusun laporan Buku Kegiatan APBD, Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan (Bankeu), Tugas Pembantuan (TP) TA. 2022, dan menyusun laporan Buku Visualisasi Kegiatan Fisik APBD Kabupaten Pekalongan Tahun 2022.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Berkurangnya jumlah personil pada Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Pekalongan karena promosi jabatan;
- 2) Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Belum semua OPD secara rutin menginput laporannya di Aplikasi SIMPEL;
- 5) Sumber daya manusia yang masih kurang penguasaan dalam bidang teknologi

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

- 1) Mengajukan penambahan personil di Bagian Administrasi Pembangunan SETDA Kabupaten Pekalongan yang berkompeten;
- 2) Dukungan alokasi anggaran yang cukup;
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan;
- 4) Meningkatkan koordinasi dalam hal penginputan di Aplikasi SIMPEL; dan
- 5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam bidang teknologi

3. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
3.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%
3.1	Administrasi Tata Pemerintahan	Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan	100 %	100 %	100%
	a. Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan mencapai 100 %.

Capain program ini didukung oleh kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan yang capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan.

Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan, terdiri dari subkegiatan:

- a. Penataan Administrasi Pemerintahan, yaitu Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang adminstrasi pemerintahan, pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat,fasilitasi forum komunikasi pimpinan daerah.Dokumen yang dihasilkan yaitu dokumen monitoring dan evaluasi rencana aksi pembekalan kepemimpinan
- b. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, pada subkegiatan ini dihasilkan dokumen Penegasan batas daerah, untuk tahun 2022 ini penegasan batas daerah yang dilaksanakan adalah penegasan batas daerah dengan Kota Pekalongan.Selain ini juga dihasilkan dokumen pembakuan rupa bumi.
- c. Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah,pada subkegiatan ini dihasilkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pekalongan ATA. 2021,Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LLPD), Dokumen Standar Pelayanan Minimal dan Dokumen Pergantian antar Waktu (PAW)

Untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja **Tingkat Kematangan Organisasi**, didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut:

1. Program Perekonomian dan Pembangunan

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Tingkat Kematangan UKPBJ	8 (angka)	8 (angka)	100%
1.1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100 %	100 %	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
	a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen	153 Dokumen	103 %
	b. Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	170 Orang	170 Orang	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program perekonomian dan pembangunan dengan indikator Tingkat kematangan UKPBJ mencapai 100 %.

Capaian program ini didukung oleh kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ didefinisikan sebagai instrument pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang Dan Jasa) yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKBPJ dalam upaya pengembangan/Penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa. Pengukuran Tingkat Kematangan UKPBJ tersebut terdiri dari 4 domain dan 9 Variabel meliputi :

- a. Domain Proses, yang mencakup variabel manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja, dan manajemen resiko
- b. Domain kelembagaan, yang mencakup variabel pengorganisasian, dan tugas/fungsi

- c. Domain Sumber Daya manusia, yang mencakup variabel perencanaan dan Pengembangan
- d. Domain Sistem Informasi, dengan variabel Sistem Informasi

Dari 9 Variabel penilaian diatas, saat ini UKPBJ Kabupaten Pekalongan dalam hal ini adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Kabupaten Pekalongan sudah memenuhi 8 Variabel, 1 Variabel yang belum terpenuhi adalah variabel manajemen pengadaan yang saat ini sedang dalam proses penilai oleh LKPP.

Jumlah paket tender pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang/Jasa sebanyak 154 paket dengan rincian 138 Pemenang, 4 tender batal dan 12 tender gagal.

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

- 1) Terlambatnya pengisian SIRUP oleh Pengguna Anggaran
- 2) Terjadinya permasalahan di Sistem Pengadaan secara Elektronik
- 3) Terlambatnya dokumen tender yang dimasukkan ke UKPBJ dari PPK
- 4) Kurangnya pengembangan kompetensi Kelompok Kerja Pemilihan di UKBJ Kabupaten Pekalongan

Alternatif Solusi untuk mengatasi kendala/hambatan :

- 1) Memberikan Sosialisasi dan bimbingan teknis dalam pengisian SIRUP sehingga bisa tepat waktu, memberikan petugas pendampingan dalam persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa.
- 2) Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik agar memanfaatkan fasilitas LPSE Support yang ada, sehingga permasalahan cepat terselesaikan.
- 3) Menghimbau kepada OPD Se – Kabupaten Pekalongan untuk segera memasukkan berkas tender sehingga tender dapat terlaksana di awal tahun anggaran.
- 4) Meningkatkan Kompetensi Kelompok Kerja Pemilihan di UKPBJ Kabupaten Pekalongan dengan Bintek ataupun Uji Kompetensi yang diselenggarakan LKPP yang dibiayai oleh pemerintah

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%	100%	100%
2.1	Penataan Organisasi	Prosentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100 %	100 %	100%
	a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	2 Dokumen	67%
	b. Peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi	Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Kegiatan dan Subkegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang mendukung Indikator Sasaran Tingkat Kematangan Organisasi , yaitu

Kegiatan Penataan Organisasi dengan subkegiatan :

a. Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Kegiatan yang dilaksanakan pada subkegiatan ini : penyusunan bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Penyusunan analisis jabatan, beban kerja dan Evaluasi Jabatan (ANJAB) .

Capain pada subkegiatan ini hanya mencapai 67 % karena Dokumen Analisis Beban Kerja dan Dokumen Evaluasi Jabatan digabung menjadi 1 Dokumen sehingga output yang tadinya 3 Dokumen mejadi hanya 2 Dokumen.

b. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Output yang dihasilkan pada subkegiatan ini adalah Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kabupaten Pekalongan, hasil PMPRB ini dikirimkan langsung Ke KEMENPAN RB melalui aplikasi MENPANRB

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bagian Organisasi.

Kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

- 1) Regulasi dari MENPAN RB yang berubah – ubah

Alternatif Solusi untuk mengatasi kendala/hambatan :

- 1) Melakukan koordinasi dengan provinsi maupun kementerian
- 2) Melakukan penyesuaian produk hukum sesuai regulasi/ketentuan

Sasaran 2 : Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi

NO	INDIKATOR KINERJA	CAP. TH. 2020	CAP. TH. 2021	TAHUN 2022			TARGET AKHIR RENSTRA	KET
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	82,13	82,57	78	83	106,41 %	80	Tercapai dengan Sangat baik

Indikator kinerja dari sasaran ini adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten. Capaian kinerja dari sasaran ini adalah 106,41%.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten ini diperoleh dari rata – rata nilai IKM yang ada pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat.

Untuk menunjang keberhasilan indikator kinerja sasaran ini, didukung oleh Program dan Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
1.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	a. Prosentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi	100 %	100 %	100 %
1.1	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	100 %	100%	100%
	a. Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen	15 Dokumen	100%
	b. Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	2 Dokumen	200%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase permohonan kerjasama sesuai ketentuan yang difasilitasi mencapai 100 %.

Capaian program ini didukung oleh kegiatan Fasilitasi Kerjasama yang capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Tata Pemerintahan, dengan subkegiatan sebagai berikut :

a. Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri

Kerjasama Dalam Negeri yang dihasilkan pada tahun 2022, adalah

- Kerjasama dengan Daerah lain : 1(satu) Naskah Kesepakatan Bersama dan 2 (dua) naskah perjanjian kerjasama
- Kerjasama dengan Pihak ketiga (lembaga/Universitas) : 3 (tiga) Naskah Kesepakatan bersama dan 15 (lima belas) Naskah Perjanjian Kerjasama.

b. Fasilitasi Kerjasama Luar Negeri

- Kerjasama dengan Pemerintah Di Luar Negeri : Jenis naskah perjanjiannya dalam bentuk menindaklanjuti Kerangka Kerja Sama

Pembangunan Bilateral antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia, dengan urusan Peningkatan Kapasitas, Legitimasi dan Keberlanjutan Organisasi Masyarakat Sipil.

- Kerjasama dengan Lembaga di Luar Negeri : Jenis naskah perjanjiannya dalam bentuk menindaklanjuti Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Dalam Negeri dengan Airbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V tentang Program Penguatan Peran Desa Desa Dalam Pembangunan Ketangguhan Nasional Melalui Peningkatan Pada Pengelolaan Risiko Bencana dan Sumber Daya Sosial Ekonomi, dengan urusan Pengelolaan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim Secara Inklusif.

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
		b. Presentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan			
1.2	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Prosentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	100 %	100 %	100 %
	a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
	b. Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	40 Kasus	53 Kasus	133 %
		Pemenuhan data laporan aksi HAM dan penilaian Peduli HAM	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %
	c. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah bulan dalam pengelolaan website JDIH dan arsip Produk hukum Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100 %
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan mencapai 100 %, dengan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum capaian kinerjanya juga mencapai 100 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Hukum dengan subkegiatan sebagai berikut:

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Kegiatan/Output pada subkegiatan ini adalah memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan, Peraturan Bupati Pekalongan dan

Keputusan Bupati Pekalongan yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan.

b. Fasilitas Bantuan Hukum

Kegiatan/Output pada subkegiatan ini adalah:

- memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin melalui Organisasi Bantuan Hukum yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
- Mengkoordinasikan data dari OPD terkait penyusunan Laporan Aksi HAM dan Penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM

c. Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum

Kegiatan/Output pada subkegiatan ini adalah: melaksanakan pengelolaan website JDIH dan pengarsipan Produk Hukum Daerah serta mendokumentasikannya.

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Kurangnya jumlah personil pada Hukum SETDA Kabupaten Pekalongan ;
- 2) Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- 4) Sumber daya manusia yang masih kurang penguasaan dalam bidang teknologi

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

- 1) Mengajukan penambahan personil di Hukum SETDA Kabupaten Pekalongan yang berkompeten;
- 2) Dukungan alokasi anggaran yang cukup;
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan; dan
- 4) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam bidang teknologi

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
1.		c. Presentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	100%	100%	100%
1.3	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	100 %	100 %	100%
	a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
1.		d.Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	100%	87,5%	87,5%
1.4	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan	100 %	91,67 %	91,67%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
		kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi			
	b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	6 Dokumen	100%
	c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja	4 Dokumen	3 Dokumen	75 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
	Kesejahteraan Masyarakat	Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Persentase Bina Mental spiritual mencapai 100 % dan Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi mencapai 87,5 %.

Capaian Program ini didukung oleh kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat capaian kinerjanya mencapai 91,67 %. Kegiatan ini diampu oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat, dengan subkegiatan:

a. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual antara lain :

- 1) Fasilitasi Pengantaran dan penjemputan calon jamaah haji ke Asrama Donohudan – Solo
- 2) Fasilitasi kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) diantaranya Isro Mi'roj, Nuzulul Qur'an, Tarawih Keliling, Nisfu Sya'ban, Perayaan Idul Adha, Maulud Nabi Muhammad SAW
- 3) Fasilitasi Kegiatan Pengajian Ulama Umaroh yang dihadiri oleh Bupati Pekalongan di wilayah Kabupaten Pekalongan

Kegiatan dilaksanakan selama bulan Januari s/d Desember 2022 dengan total kegiatan sebanyak 200 lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Pekalongan.

- 4) Fasilitasi Kegiatan Kabupaten Pekalongan bersholawat setiap malam Selasa Wage
- 5) Fasilitasi Peringatan Hari Santri (Ziarah Makam Ulama)
- 6) Fasilitasi Jamuan Makan Peserta Sholat Dhuhur di Masjid Al Muhtaram – Kajen

Jamuan Makan Siang peserta sholat dhuhur di Masjid Al Muhtaram-Kajen dimaksudkan untuk meramaikan jumlah jamaah masjid pada saat sholat dhuhur. Hal ini rutin dilakukan setiap hari Selasa dan Rabu setiap minggunya selama bulan Januari s/d Desember 2022.

- 7) Fasilitasi Seleksi Pengurus Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Pekalongan

Kegiatan Pelantikan Pimpinan Baznas Tahun 2022 – 2027 dilaksanakan pada Hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022.

- b. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial antara lain :

- 1) Memfasilitasi kegiatan khitan masal untuk anak dari keluarga miskin di wilayah Kabupaten Pekalongan

Khitan Massal pada tahun 2022, diikuti oleh 100 anak dari keluarga yang kurang mampu yang diusulkan oleh kecamatan se-Kabupaten Pekalongan.

- 2) Pemberian Bantuan Sosial Kambing Qurban kepada lembaga Non Pemerintahan dalam peringatan Hari Raya Idul Adha 1443 H

Pada tahun 2022 tersedia anggaran Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) diserahkan dalam bentuk Kambing Qurban sebanyak 60 ekor yang diserahkan kepada 48 lembaga yang tersebar di wilayah Kabupaten Pekalongan.

3) Pemberian Insentif Imam dan Marbot Masjid di wilayah Kabupaten Pekalongan

Pemberian Insentif Imam dan Marbot Masjid diberikan kepada 860 Masjid sesuai usulan dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Pekalongan

4) Pemberian insentif penjaga keamanan makam di wilayah kabupaten pekalongan

Insentif penjaga keamanan makam diberikan kepada Penjaga Makam di 285 Desa yang ada di Kabupaten Pekalongan, sisa 2 desa yaitu Kelurahan Wiradesa dan Desa Kepatihan Kecamatan Wiradesa dikarenakan tidak mempunyai Makam di lokasi kelurahan/desa tersebut.

5) Pemberian hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar

- Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, untuk 4 lembaga dengan realisasi 100%
- Belanja hibah yang kepada badan dan lembaga yang bersifat Nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT).

Direncanakan untuk 105 Lembaga, terealisasi 97 Lembaga, 8 lembaga yang tidak terealisasi adalah :

- a) Musholla Nurul Fadhilah Dk.Puncisan RT.VI Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni dengan keterangan mengundurkan diri
- b) Masjid Darul Masyhur Desa Tangkil Kulon Kecamatan Kedungwuni dengan keterangan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak mengajukan proposal pencairan
- c) Masjid Jami' Darurrohman Desa Krandegan kecamatan Paninggaran dengan keterangan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak mengajukan proposal pencairan
- d) Musholla Al Falah Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni dengan keterangan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak mengajukan proposal pencairan

- e) Musholla Nurul Anwar Dk. Tangkil RT.V Desa Tangkil Kulon Kecamatan Tirto dengan keterangan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak mengajukan proposal pencairan
- f) Musholla Al Amin Dk. Pegandon Lor RT.05 RW.03 Desa Pegandon Kecamatan Karangdadap dengan keterangan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak mengajukan proposal pencairan
- g) Musholla Nurul Huda Desa Tangkil Kulon RT.001 RW.001 Kecamatan Kedungwuni dengan keterangan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak mengajukan proposal pencairan
- h) Musholla Nurul Taufik Desa Sidomukti Kecamatan Karanganyar dengan keterangan tidak memenuhi syarat administrasi karena tidak mengajukan proposal pencairan
- Belanja hibah uang kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial yang bersifat sosial kemasyarakatan Direncanakan untuk 7 Lembaga, terealisasi 6 Lembaga, 1 Lembaga yang tidak terealisasi yaitu : Hibah kepada IPNU / IPPNU Kecamatan Sragi dengan keterangan mengundurkan diri
- Pemberian bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintah (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
 - a) Lembaga Sosial Al Hikmah Nahdatul Ulama
 - b) Lembaga Sosial Ummul Yatama
 - c) Organisasi Sosial Anak Yatim Yarohim
 - d) Panti Asuhan Anak Yatim La Tahzan Muhammadiyah Cabang Pencongan Wiradesa
 - e) Panti Asuhan Arrahman Kelurahan Bener Kecamatan Wiradesa
 - f) Panti Asuhan Darul Aitam Al Maktab Desa Simbang Kulon Kecamatan Buaran
 - g) Panti Asuhan Darul Hadlonah Muslimat NU Sedayu Kecamatan Wonopringgo
 - h) Panti Asuhan MPKKM PCM Muhammadiyah Wonopringgo

- i) Panti Asuhan PKS Muhammadiyah Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni
- j) Panti Asuhan Raudhotus Sibyan Desa Proto Kecamatan Kedungwuni
- k) Panti Asuhan Yatim dan Miskin MPS Cabang Muhammadiyah Kedungwuni
- l) Panti Asuhan Yatim Putra dan Putri Muhammadiyah Kajen
- m) Panti Asuhan Yatim Putri Aisyiyah Kelurahan Pekajangan Kecamatan Kedungwuni
- n) Yayasan Darul Khadhonah Desa Petukangan Kecamatan Wiradesa
- o) Yayasan Kesejahteraan Anak Yatim Piatu Nurul Yatama Desa Pecakaran Kecamatan Wonokerto
- p) Yayasan Malakhatul Ummah Kelurahan Mayangan Kecamatan Wiradesa
- q) Yayasan Non Panti Yatama Al Amin Desa Kedungjaran Kecamatan Sragi
- r) Yayasan Sayap Sehat Karanganyar
- s) Yayasan Sosial Tabarat Kelurahan Kepatihan Kecamatan Wiradesa
- t) Yayasan Yatim Non Panti Mu'awanatul Aitam Simbang Kulon Kecamatan Buaran
- u) Yayasan Yatim Piatu Non Panti Bani Aziz Fatimah Desa Rowokembu Kecamatan Wonopringgo

c. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat antara lain:

- 1) Memfasilitasi pembangunan bidang Kesejahteraan Rakyat Bersama tokoh masyarakat

Kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan dalam rangka Sinergitas Pembangunan bidang Kesejahteraan Rakyat sekaligus pembinaan

masyarakat yang dijadwalkan setiap bulan dengan tempat pelaksanaan di Balai Desa se Kabupaten Pekalongan. Namun pada tahun 2022 ternyata Bupati Pekalongan telah melakukan Silaturahmi dan Pembinaan langsung turun ke bawah bersamaan dengan kegiatan lain seperti pada saat peresmian jalan dan kegiatan lainnya.

2) Memfasilitasi kegiatan MTQ/STQ/MHQ Kabupaten Pekalongan yang dikirimkan ke tingkat Provinsi

Dalam kegiatan ini Kabupaten Pekalongan berhasil memperoleh prestasi sebagai berikut :

- Cabang Seni Baca Al Qur'an Golongan Tilawah Anak-anak (PA) Terbaik II, Nama : Ahmad Alfa Khamdani, utusan dari Kecamatan Buaran
- Cabang Tafsir Al Qur'an Golongan Bahasa Indonesia (PA) Terbaik II, Nama : M. Muchib Maulana, utusan dari Kec. Kedungwuni
- Cabang Hafalan Al Qur'an Golongan 1 Juz dan Tilawah (PA) Harapan I, Nama : Ahmad Khairin Munada, utusan dari Kec. Karangdadap
- Cabang Hafalan Al Qur'an Golongan 10 Juz (PI) Harapan I, Nama : Tsania Arifada, utusan dari Kecamatan Wonokerto
- Cabang Hafalan Al Qur'an Golongan 20 Juz (PI) Harapan II, Nama : Aisyah Zalfa Zakiyah, utusan dari Kec. Kedungwuni

3) Memfasilitasi Silaturahmi dan Doa Bersama Yatim Piatu

4) Memfasilitasi Apel Besar Ormas tingkat Kabupaten Pekalongan

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

- 1) Kurangnya koordinasi dengan OPD lain terkait perencanaan kegiatan;
- 2) Belum ada teknologi aplikasi dalam penanganan usulan hibah/bansos;
- 3) Regulasi terkait tata laksana administrasi hibah/bansos belum terupdate dengan aturan yang ada
- 4) Jumlah SDM yang belum terpenuhi sesuai hasil Anjab

- 5) Keterbatasan anggaran terkait Administrasi Perkantoran di Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

- 1) Mengkoordinasikan dengan OPD teknis terkait kegiatan yang dapat disatukan sehingga ada efisiensi anggaran
- 2) Membuat usulan terkait Pengadaan Aplikasi E-Hibah/Bansos
- 3) Berkoordinasi dengan OPD terkait mengenai Regulasi Hibah/Bansos agar segera diperbaharui
- 4) Mengusulkan tambahan SDM ke BPSDM dan Diklat
- 5) Mengajukan usulan penambahan anggaran

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	a.Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	100 %	100 %	100 %
2.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100%
	a Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/Bulan	144 Orang/Bulan	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
	b Koordinasi dan . Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
2.2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100 %	100 %	100%
	a Pendataan dan . Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	b Pendidikan dan . Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang	38 Orang	253%
	c Sosialisasi . Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	150 Orang	85 Orang	56,67%
	d Bimbingan Teknis . Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	100 Orang	100 Orang	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
		Undangan			
2.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%
	a Penyediaan . Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
	b Penyediaan . Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
	c Penyediaan . Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100%
	d Penyediaan . Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	100%
	e Fasilitasi . Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	100%
	f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	12 Laporan	100%

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
	SKPD	dan Konsultasi SKPD			
	g Penatausahaan . Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen	180 Dokumen	7 %
2.4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %
	a Penyediaan Jasa . Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100 %
	b Penyediaan Jasa . Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100 %
	c Penyediaan Jasa . Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	100 %
	d Penyediaan Jasa . Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	12 laporan	100 %
2.5	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Prosentase bulan pemenuhan fasilitasi	100 %	100 %	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
		kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
	a Penyediaan . Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100 %
	b Penyediaan . Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	100 %
2.6.	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 %	100 %	100 %
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/ Bulan	2 Orang/ Bulan	100 %
	b. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala	9 Orang/ Bulan	9 Orang/ Bulan	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
		Daerah			
2.7	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi	100 %	100%	100 %
	a. Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	b. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	100 %
	c. Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	1 Laporan	100 %

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah mencapai 100 %.

Kegiatan/subkegiatan yang mendukung capaian indikator prosentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah merupakan kegiatan rutin yang diampu oleh Bagian Umum, Bagian Hukum dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian capaian kinerja :

- 1) Belum adanya tenaga/personil arsiparis
- 2) Terbatasnya SDM yang menguasai kehumasan
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas

Alternatif solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala :

- 1) Mengajukan permohonan pejabat fungsional arsiparis

2) Memaksimalkan Sarana prasarana yang ada dan mengajukan permohonan pengadaan sarpras

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
2		a. Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %
2.8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	100 %	100 %
	a. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket	50 Paket	100 %
	b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	95 Unit	95 Unit	100 %
2.9	Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100%	100 %

No	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	31 Unit	31 Unit	100 %
	b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	16 Unit	100 %
	c. Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit	30 Unit	100 %
	d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit	160 Unit	100 %
	e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit	8 Unit	100 %

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah mencapai 100 %.

Kegiatan/subkegiatan yang mendukung capaian indikator prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah merupakan kegiatan rutin yang diampu oleh Bagian Umum.

E. MATRIKS REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS YANG TERKAIT RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Target RPJMD	% Capaian terhdp Target Akhir RPJMD
				Target	Realisasi	% Capaian		
1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	B (65)	B (64,18)*	98,74 %	BB (75)	85,57
2	Meningkatnya efektifitas pelayanan public yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	Rata – rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	Nilai	78	83	106,4	80	103,75

*) Data capaian menggunakan LHE Tahun 2021

Sekretariat Daerah mendukung sasaran strategis Misi Ke – 2 (dua) pada RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026

1. Berdasarkan tabel diatas untuk sasaran Meningkatnya Kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah,

dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Kabupaten dengan capaian kinerja sebesar 98,74 % atau tercapai dengan kategori Baik.

Data capaian tahun 2022 ini masih menggunakan data capaian tahun 2021, karena untuk LHE AKIP tahun 2022 masih menunggu hasil dari KEMENPAN- RB

2. Perbandingan Capaian Kinerja dari tahun sebelumnya ada pada data di bawah ini:

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Nilai SAKIP	64,02	64,18	64,18
IKM	82,13	82,57	83

Pada tabel diatas, dapat dilihat bawah capaian kinerja untuk Nilai SAKIP dan IKM mengalami peningkatan dari tahun – tahun sebelumnya.

3. Hambatan dan Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis adalah :
- Dalam Evaluasi SAKIP bukan hanya sekedar pemenuhan dokumen – dokumen Perencanaan (RKT dan Renstra/RPJMD, Renja/RKPD), Penganggaran, laporan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi tapi adanya dokumen – dokumen lain
 - Adanya keterbatasan kapabilitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja di Lingkungan Perangkat Daerah
 - Implementasi SAKIP belum optimal, salah satu aspeknya adalah terkait dengan komitmen dan koordinasi
 - Keterlambatan unit pelayan public dalam menyusun Survey Kepuasan Masyarakat

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka melaksanakan beberapa kegiatan selama tahun anggaran 2022, Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan memperoleh dana bersumber dari APBD II yang berupa anggaran belanja pengadaan dan anggaran belanja non pengadaan.

Belanja Non Pengadaan atau yang dulu disebut Belanja Tidak Langsung (Anggaran gaji/tunjangan ASN Dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Belanja Hibah Uang dan Bantuan Sosial uang) sebesar Rp. 25.419.266.000,00 terealisasi sebesar Rp. 24.736.286.763,- dan sisa anggaran sebesar Rp. 682.979.237,00. Belanja pengadaan atau belanja langsung diluar belanja pegawai/Hibah dan Bansos sebesar Rp. 25.273.570.700 terealisasi sejumlah Rp. 22.844.638.941,00 sisa anggaran Rp. 2.428.931.759. Dengan keseluruhan belanja pengadaan maupun belanja non pengadaan sebesar Rp. 50.692.836.700 realisasi Rp. 47.580.925.704,00 sisa anggaran Rp. 3.111.910.996,00.

Terdapatnya sisa anggaran karena ada efisiensi dan pengeluaran belanja sesuai kebutuhan.

Secara keseluruhan jumlah dana belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan terinci sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan oleh Bagian Tata Pemerintahan dari anggaran Rp. 805.000.000,- terserap sejumlah Rp. 754.096.119,00 dan sisa anggaran Rp. 50.903.881,00.
- b. Dilaksanakan oleh Bagian Hukum dari anggaran Rp. 672.530.000,00 terserap sejumlah Rp. 473.879.142 dan sisa anggaran Rp 198.650.858,00
- c. Dilaksanakan oleh Bagian Kesra dari anggaran Rp. 14.401.094.500,00 terserap sejumlah Rp. 13.321.503.100,00 dan sisa anggaran Rp. 1.079.591.400,00
- d. Dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dari anggaran Rp. 732.724.200,00 terserap sejumlah Rp 560.394.870,00 dan sisa anggaran Rp. 172.329.330,00
- e. Dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dari anggaran Rp. 270.860.000,00 terserap sejumlah Rp. 261.722.458,00 dan sisa anggaran Rp. 9.137.542,00
- f. Dilaksanakan oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dari anggaran Rp. 579.101.000,00 terserap sejumlah Rp. 574.290.387,00 dan sisa anggaran 4.810.613,00

- g. Dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dari anggaran Rp. 505.137.000,00 dan terserap sejumlah Rp. 360.345.522,00 dan sisa anggaran Rp. 144.791.978,00
- h. Dilaksanakan oleh Bagian Umum dari anggaran Rp. 29.961.014.500,00 dan terserap sejumlah Rp. 29.218.425.476,00 dan sisa anggaran Rp. 742.589.024,00
- i. Dilaksanakan oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dari anggaran Rp.2.668.605.000,00 dan terserap sejumlah Rp. 2.003.803.030,00 dan sisa anggaran Rp.664.801.970,00.

Dalam pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan administrasi keuangan secara tertib sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebagaimana tersirat dalam Bab III, maka dapat diketahui sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Sasaran yang ingin diwujudkan oleh **Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan terdiri dari 2 (dua)** sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Secara garis besar, indikator kinerja sasaran sudah mencapai kategori yang diharapkan dan secara nilai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Tingkat pencapaian sasaran tertinggi yaitu Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan indikator kinerja sasarnya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Pekalongan sebesar 83.

Nilai rata-rata Pencapaian Indikator Kinerja Utama yang telah diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan sebesar 99,09%, capaian kinerja ini masuk dalam kategori berhasil.

B. Prestasi yang diraih di Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan.

Prestasi/ Penghargaan/ Kejuaraan/ Lomba Tahun 2022 yang diraih adalah :

1. Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tingkat Nasional Tahun 2022, Inovasi Laboratorium Kemiskinan meraih TOP 15 Kelompok Khusus
2. Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh KeMENPANRB meraih Nilai A dengan predikat Sangat Baik
3. Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI meraih Nilai Zona Hijau
4. Terbaik II Cabang Seni Baca Al Quran Tilawah anak – anak (PA) Kejuaraan MTQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXIX
5. Terbaik II Cabang Tafsir Al Quran Gol. Bahasa Indonesia (PA) Kejuaraan MTQ Tingkat Provinsi Jawa Tengah XXIX

C. Hal – hal yang ingin dicapai ditahun mendatang

- 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dalam rangka mendukung kinerja manajemen pemerintahan daerah
- 2) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien serta meningkatkan akuntabilitas sehingga bisa mencapai target Nilai AKIP yang direncanakan
- 3) Meningkatkan capaian indeks Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kinerja dan reformasi birokrasi sesuai dengan regulasi yang ada
- 4) Melaksanakan pengelolaan Kalembeagaan sesuai regulasi terbaru sehingga indeks kematangan organisasi yang ditargetkan bisa tercapai
- 5) Malaksanakan penataan produk hukum dan meningkatkan budaya taat hukum serta pengembangan SJDH Hukum dengan menggunakan TIK berbasis internet dan peningkatan SDM yang berbasis IT.
- 6) Meningkatkan koordinasi ke Perangkat Daerah terkait penginputan SIRUP dan SIMPEL.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan yang dapat kami sampaikan, sebagai acuan kerja selanjutnya.

Kajen, 6 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
SETDA
M. YULIAN AMBAR, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750710 199903 1 008

MATRIK CAPAIAN KINERJA

NO	SABARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	YAHUN 2022		TARJET AKHER REINSTR	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA TERHADAP TARJET AKHER REINSTR	PROGRAM	KIBGIAW BUKBAGIAN	ANGGARAN	BERAPA	BILAH	OPD PENANGGUNG JAWAB
			TARJET	REALISASI								
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten	B (80)	B (84,16)	85,57	88,74	Program Peningkatan dan Kapasitas Rakrya	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Subbagian Peningkatan Administrasi Pemerintahan Subbagian Pengelolaan Administrasi Kesejahteraan Subbagian Fasilitas Pelaksanaan Operasi	546.000.000 195.000.000 190.000.000 270.000.000 388.000.000	803.853.878 195.327.894 177.085.082 241.568.460 278.247.981	41.049.474 9.682.008 2.814.815 28.433.550 88.782.048	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
							Program Perencanaan dan Pembangunan	Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Subbagian Koordinasi, Sinergisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan Subbagian Pengendalian dan Disiplin Perencanaan Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam Subbagian Koordinasi, Sinergisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Subbagian Koordinasi, Sinergisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Subbagian Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	278.000.000 90.000.000 367.754.200 331.824.200 33.800.000 243.020.000 70.000.000 170.800.000	204.088.744 72.161.207 294.148.918 290.785.789 33.390.120 232.421.082 66.390.089 194.195.018	70.813.259 17.838.783 83.877.284 81.187.401 2.439.850 8.438.918 1.733.924	BAGIAN PERENCANAAN
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Peningkatan Operasional Subbagian Koordinasi dan Penyiapan Laporan Kinerja pemerintahan daerah Subbagian Fasilitas pelayanan publik dan sos lainnya	328.000.000 75.000.000 175.000.000	195.402.848 85.987.500 101.279.155	128.087.446 18.042.722 73.720.845	BAGIAN ORGANISASI

Kegiatan Penyediaan Jasa Penyjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.330.628.000	2.178.271.231	151.368.789	BAGIAN UMUM
Subbagian Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.181.518.000	1.136.885.439	24.632.562	
Subbagian Penyediaan Jasa Perbaikan dan Perawatan Kendaraan	284.451.000	284.323.300	107.700	
Subbagian Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	1.777.100.000	1.666.208.043	110.891.957	
Kantor				
Subbagian Penyediaan Jasa Surat Menyurat	107.574.000	82.080.450	15.493.550	
Kegiatan Administrasi dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3.138.808.000	1.386.788.137	747.846.868	BAGIAN UMUM, BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
Subbagian Penyediaan Caji dan Turjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	885.000.000	788.031.780	128.168.214	BAGIAN UMUM
Subbagian Penyediaan Dana Peningkat Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.243.005.000	623.928.349	619.678.654	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
Kegiatan Fasilitas Komersial/kegiatan Sosial/arts/daerah	2.188.784.200	2.328.901.028	80.885.172	BAGIAN UMUM
Subbagian Penyediaan Kabupaten/Batas Tengah Kepala Daerah	1.261.784.200	1.244.818.690	16.965.510	
Subbagian Penyediaan Kabupaten/Rumit Tengg Weil Kepala Daerah	926.000.000	881.085.148	13.914.852	
Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.428.000.000	1.379.878.884	48.121.116	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
Subbagian Fasilitas Komunikasi/Pimpinan	128.000.000	124.787.900	202.500	
Subbagian Fasilitas Komunikasi/Pimpinan	500.000.000	487.178.034	42.821.966	
Subbagian Pendukung/kegiatan Tugas Pimpinan	600.000.000	797.907.160	2.088.650	
Kegiatan Propedem Sarang Weil Daerah Penyjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.402.081.000	1.381.482.822	140.888.178	BAGIAN UMUM
Subbagian Pengadaan Mebel	375.815.000	316.738.600	59.076.400	
Subbagian Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.026.416.000	942.883.922	81.751.078	

RINCIAN REALISASI KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	Sub Kegiatan	Anggaran Perubahan	Realisasi		Sisa Anggaran	
			Rp.	%	Rp.	%
1)	Bagian Tata Pemerintahan	805.000.000	754.096.119	93,68	60.903.881	6,32
1	Pelayanan Administrasi Pemerintahan	195.000.000	185.307.994	95,03	9.692.006	4,97
2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	180.000.000	177.085.082	98,38	2.914.918	1,62
3	Facilities Pelaksanaan Otonomi Daerah	270.000.000	241.566.450	89,47	28.433.550	10,53
4	Facilities Kerja Sama Dalam Negeri	130.000.000,00	127.957.388,00	98,20	2.342.602	1,80
5	Facilities Kerja Sama Luar Negeri	30.000.000,00	22.479.195,00	74,93	7.520.805	25,07
2)	Bagian Hukum	769.300.000	526.344.742	68,42	242.955.258	31,58
1	Facilities Penyusunan Produk Hukum Daerah	186.349.500	106.288.266	57,04	60.061.235	42,96
2	Facilities Bantuan Hukum	402.190.500	317.370.859	78,91	84.808.641	21,09
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	84.000.000	50.220.018	59,79	33.779.982	40,21
4	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	83.000.000,00	49.778.800,00	49,13	42.221.400	50,87
5	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	13.770.000,00	11.897.000,00	84,97	2.083.000	15,13
3)	Bagian Kesejahteraan Rakyat	14.401.084.800	13.321.503.100	92,50	1.079.581.400	7,50
1	Facilities Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.781.458.900	2.593.065.900	93,60	188.373.800	6,10
2	Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	10.490.535.900	10.093.331.000	96,12	497.304.000	3,88
3	Subkegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	1.149.000.000	645.086.800	56,14	503.913.800	43,86
4)	Bagian Perencanaan	732.724.200	560.394.870	76,48	172.329.330	23,52
1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	275.000.000	204.086.744	74,21	70.913.256	25,79
2	Pengendalian dan Distribusi Perencanaan	80.000.000	72.161.207	90,16	7.838.793	9,82
3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	331.824.200	250.788.789	75,56	81.137.401	24,44
4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	35.800.000	33.380.120	93,18	2.439.880	6,82
5)	Bagian Administrasi Pembangunan	270.860.000	261.722.458	96,93	9.137.542,00	3,37
1	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	70.000.000	68.266.068	97,52	1.733.934	2,48
2	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	170.860.000	164.155.016	96,08	6.704.984	3,92
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30.000.000	28.301.376	94,34	1.698.624	5,66
6)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	679.101.000	574.290.387,00	84,58	104.810.613	15,42
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	332.791.000	328.374.685	98,97	4.416.305	1,03
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	225.000.000	224.188.992	99,64	801.008	0,36
3	Pembinaan dan Achromasi Pengadaan Barang dan Jasa	21.310.000	20.716.700	97,22	593.300	2,78
7)	Bagian Organisasi	806.137.800	369.348.822	45,82	436.788.978	54,18
1	Koordinasi dan Penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	75.000.000	59.957.300	79,93	16.042.700	21,39
2	Facilities pelayanan publik dan tata laksana	175.000.000	101.279.155	57,87	73.720.845	42,13
3	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	75.000.000	38.168.100	50,89	36.831.900	49,11
4	Peningkatan kinerja dan reformasi Birokrasi	70.000.000	60.122.800	85,89	9.877.100	14,11
5	Pengelolaan Kelambagaan dan Analisis Jabatan	100.000.000	94.523.817	94,52	5.476.183	5,48
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.137.500	7.286.250	71,97	2.841.250	28,03
8)	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.003.803.030	2.003.803.030	100,00	0	0,00
1	Facilities Keprotokolan	125.000.000	124.797.500	99,84	202.500	0,16
2	Facilities Komunikasi Pimpinan	500.000.000	457.178.034	91,44	42.821.966	8,56
3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	500.000.000	787.801.150	157,76	2.098.850	0,26
4	Pemecahan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.243.605.000	623.926.346	50,17	619.678.654	49,83

3)	Bagian Umum	29.961.014.600	29.218.425.476	97,52	742.689.024	2,48
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	16.287.696.000	16.112.854.977	98,93	174.811.023	1,07
2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	383.910.000	374.669.000	97,60	9.221.000	2,40
3	Pencapaian dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	90.000.000	85.456.956	94,95	4.543.044	5,05
4	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	84.508.003	84,51	5.490.997	5,49
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	73.607.500	98,14	1.392.500	1,86
5	Penyediaan Pelatihan dan Peningkatan Kantor	366.300.000	361.931.250	98,81	4.368.750	1,18
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	245.000.000	226.806.500	92,57	18.193.500	7,43
8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian	100.000.000	99.425.000	99,43	575.000	0,58
9	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.120.000.000	1.118.648.100	99,86	1.351.900	0,12
10	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	599.724.848	99,95	275.152	0,05
11	Pembastaraan Arak Dinamis pada SKPD	29.859.500	24.188.500	81,59	5.461.000	18,41
12	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.161.515.000	1.136.858.439	97,89	24.856.562	2,14
13	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peningkatan Kantor	284.431.000	284.323.300	99,98	107.700	0,04
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.777.100.000	1.699.209.043	95,76	110.890.957	6,24
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	107.574.000,00	92.080.450,00	85,60	15.493.550	14,40
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	500.000.000	766.631.768	85,68	126.168.214	14,32
17	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.281.784.200	1.244.815.880	98,66	16.968.320	1,34
18	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	500.000.000	681.065.148	99,43	13.914.852	1,55
18	Pengadaan Mebel	375.615.000	318.798.600	84,87	56.816.400	15,13
20	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.028.416.000	842.663.922	81,84	83.752.078	8,16
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.017.672.000	978.403.993	96,14	39.268.007	3,88
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	566.103.000	582.559.541	97,73	13.543.456	2,27
23	Pemeliharaan Mebel	100.000.000	99.020.000	99,02	980.000	0,98
24	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	315.268.800	306.899.741	97,35	8.369.059	2,65
25	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	750.000.000	746.224.000	99,50	3.776.000	0,50
	TOTAL SETDA	50.692.836.700	47.559.925.704	93,86	3.111.910.996	6,14



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Name : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : FADIA ARAFIQ, S.E., M.M.

Jabatan : Bupati Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2022

Pihak Kedua,


BUPATI PEKALONGAN
FADIA ARAFIQ, S.E., M.M.

Pihak Pertama,


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19750710 199903 1 908

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

No	Sasaran Strategis dan Program	Indikator Kinerja Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Tingkat Kematangan Organisasi (Indeks)	S (32)
		2. Nilai SAKIP Kabupaten (Nilai)	B (66)
2.	Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78

PROGRAM

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Program Perekonomian Dan Pembangunan

Jumlah

ANGGARAN

Rp. 33.261.527.000

Rp. 15.878.624.500

Rp. 1.552.685.200

Rp. 50.692.836.700

KETERANGAN

APBD

APBD

APBD

APBD

Kajen, Oktober 2022



Dr. YULIANI AKBAR, S.Sos.M.Si.
NIP. 19750710 199903 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos , M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekaiongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.

Pembina Tk. I

NIP. 19711225 199803 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BAGIAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	2	3	4
1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	1. Persentase Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan yang tersusun 1.1. Presentase Laporan Realisasi Fisik seluruh OPD	100 %
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2. Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja 2.1. Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100% 100%

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.1. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Rp. 240.860.000,- Rp. 240.860.000,-	APBD APBD
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 30.000.000,- Rp. 30.000.000,-	APBD APBD

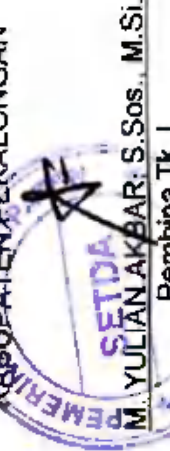
Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.
 Pembina Tk. I

NIP. 19750710 199903 1 008

NIP. 19711225 199803 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADITOMO HERLAMBANG, SH

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos, M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lamplan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, *oktober* 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN


YULIAN AKBAR, S.Sos.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19750710 199903 1 008


ADITOMO HERLAMBANG, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19880517 198903 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**

No.	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase ketercapaian pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100% 100%
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat a. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Presentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Presentase pembentukan produk hukum dan publikasinya sebagai bentuk kebijakan daerah	100% 100%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota a. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp Rp Rp	96.770.000 96.770.000 672.530.000
2 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat a. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp	672.530.000

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Kedua



M. YULIAN AKBAR, S.Sos.M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN,

ADITOMO HERLAMBEANG, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19680517 198903 1 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P.
Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Setda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos.M.Si
Jabatan : Sekretaris Daerah Kab. Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan membenarkan supervisi yang dipedukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dipedukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
SETDA
M. YULIAN AKBAR, S.Sos.M.Si
NIP. 19750710 199903 1 008

PIHAK PERTAMA
Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P.
NIP. 19690118 198903 1 007

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAGIAN ORGANISASI SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1 Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100 %
	1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1 Persentase dokumen perencanaan, anggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	100 %
	1.2 Penataan Organisasi	1.2 Persentase perangkat daerah berkinerjanya baik	100 %

PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 PROGRAM Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 505,137,500	APBD
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 10.137.500	APBD
1.2 Penataan Organisasi	Rp 495.000.000	
Jumlah	Rp 505.137.500	APBD

Kajen, **01 Oktober** 2022



PIHAK PERTAMA

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P.
 NIP. 19690118 198903 1 007

M. YULIAN KBAR, S.Sos.M.Si
 NIP. 19750710 199903 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERI PANCASILARDI, SE., MM.

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN

HERI PANCASILARDI, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I


NIP. 19650601 199303 1 020

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1. Tingkat Kematangan UKPBJ	8 Angka
	1.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.1. Persentase terselesaikannya tender pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	100%

NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
 1. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 1.1. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

ANGGARAN KETERANGAN
 Rp 579.101.000 APBD
 Rp 579.101.000 APBD

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19750710 199903 1 008

Kajen, **oktober** 2022
 Pihak Pertama,
KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


HERI PANCASILARDI, S.E., M.M.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19650601 199303 1 020



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TOHARNO, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, **oktober** 2022

Pihak Kedua,

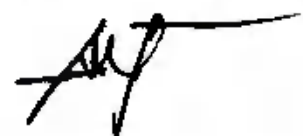
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN


M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


TOHARNO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650127 198509 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO (1)	PROGRAM/ KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	100 %
	1.1. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Prosentase kebijakan perekonomian daerah yang dilakukan money	100 %
	1.2. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase kebijakan SDA yang dilakukan money	100 %

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp 400.800.000	APBD
	Rp 331.924.200	DBHCHT
1.1 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Rp 385.000.000	APBD
1.2 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Rp 35.800.000	APBD
	Rp 331.924.200	DBHCHT
Jumlah	Rp 732.724.200	

Kajen, *Oktober* 2022


Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si
 Pembina Tk. I
 NIP. 19750710 199903 1 008


TOHARNO, S.Sos., M.Si
 Pembina Tk. I
 HIP. 19650127 198509 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. HANDY ARTAWAN, S.KEP, M.M
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Kab. Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Kedua

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I
NiP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN**

R. HANDY ARTAWAN, S.KEP, M.M
Pembina Tk.I
NiP. 19770422 199702 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. PEKALONGAN**

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	<p>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</p> <p>1.1. Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</p> <p>1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>1. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1.1. Prosentase kegiatan keprotokolan yang terfasilitasi</p> <p>1.2. Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.668.605.000	APBD
1.1.	Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.425.000.000	APBD
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.243.605.000	APBD

Kajen, **oktober** 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN**

R. HANDY ARTAWAN, S. KEP. M.M

Pembina Tk.I

NIP. 19770422 199702 1 001

Pihak Kedua,

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN**



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19750710 199903 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KISTORO, SE, MM.

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Setaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dipedukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, *Oktober* 2022

Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AKBAR, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19750710 199903 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

KISTORO, SE, MM.
Penata Tingkat I
NIP. 19750503 201001 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BAGIAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3	4
1	1.1. Administrasi Tata Pemerintahan 1.2. Fasilitasi Kerjasama Daerah	1.a. Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan b. Persentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi 1.1. Prosentase pemenuhan dokumen bidang tata kelola pemerintahan 1.2. Persentase naskah kerja sama daerah yang terfasilitasi	100 % 100% 100% 100%

- NO. PROGRAM DAN KEGIATAN
1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - 1.1. Administrasi Tata Pemerintahan
 - 1.2. Fasilitasi Kerjasama Daerah

- ANGGARAN
- Rp. 805.000.000,-
 Rp. 645.000.000,-
 Rp. 160.000.000,-
- KETERANGAN
- APBD
 APBD
 APBD

Pihak Kedua,



KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

Kajen, Oktober 2022

Pihak Pertama,

KISTORO, SE. MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750503 201001 1 001



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : SUHERMAN, SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. YULIAN AKBAR, S.Sos. M.Si

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapei target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang dipertukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2022

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN**



**M. YULIAN AKBAR, S.Sos M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19750710 199903 1 008**

**PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KAB. PEKALONGAN**

**SUHERMAN SE, MM
Pembina
NIP. 19660910 198903 1 011**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BAGIAN UMUM SETDA KAB. PEKALONGAN**

No.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	1. a. Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi: Kepegawaian, Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah b. Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1 Persentase ketercapaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%
1.2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.2 Persentase ketercapaian pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.3 Persentase ketercapaian administrasi umum Perangkat Daerah	100%
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.4 Persentase ketercapaian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.5 Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
1.6	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.6 Persentase ketercapaian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%
1.7	Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.7 Prosentase bulan pemenuhan fasilitas kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%
1.8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.8 Prosentase pemenuhan Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100%

NO PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	29.961.014.500	APBD
1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16.671.576.000	APBD
1.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	190.000.000	APBD
1.3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.535.959.500	APBD
1.4 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.330.620.000	APBD
1.5 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.779.043.800	APBD
1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.402.031.000	APBD
1.7 Kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.156.784.200	APBD
1.8 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	895.000.000	APBD

Kajen, *Oktober* 2022

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN



M. YULIAN AMBAR, S.Sos M.Si
Pembina Tk. I

NIP. 19750710 199903 1 008

PIHAK PERTAMA
KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KAB. PEKALONGAN

SUHERMAN SE, MM
Pembina

NIP. 19680910 198903 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUBAGYO, S.H., M.M

Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. YULIAN AKBAR, S. Sos., M.Si.

Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, **oktober** 2022

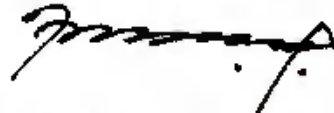
Pihak Kedua,

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN


M. YULIAN AKBAR, S. Sos., M.Si.
Pembina TK. I
NIP. 19750719 199903 1 008

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT SETDA KAB. PEKALONGAN


SUBAGYO, S.H., M.M
Pembina TK I
NIP. 19660620 199402 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN PEKALONGAN**

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.a. Presentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi 1.b. Presentase Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi 1.1. Persentase kegiatan keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang difasilitasi	100% 100% 100%

NO. PROGRAM

1. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1.1. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

ANGGARAN

Rp. 14.401.094.500,-
Rp. 14.401.094.500,-

KETERANGAN

APBD
APBD

Pihak Kedua,

Kajen, **oktober** 2022

Pihak Pertama,



M. YULIAN AKHAR, S. Sos., M.Si.
Pembina TK. I

NIP. 19750710 199903 1 008

KEPALA BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA
KAB. PEKALONGAN

SUBAGYO, S.H., M.M.
Pembina TK I

NIP. 19660620 199402 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOCH. AULIA HAKIM, SH
Jabatan : Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ADITOMO HERLAMBANG, SH
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680517 198903 1 009

Pihak Pertama,

SUB KOORUINATOR DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BAGIAN
HUKUM SETDA KABUPATEN
PEKALONGAN

MOCH. AULIA HAKIM, SH
Penata Tk. I
NIP. 19830124 201001 1 011

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Subkegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang
2	Subkegiatan Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum	Jumlah bulan dalam pengelolaan website JDIH dan arsip Produk Hukum Daerah Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum Yang Didokumentasikan	12 bulan 3 Dokumen

Sub Kegiatan

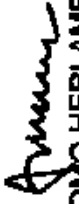
- 1 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- 2 Subkegiatan Pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum

Keterangan


Anggaran	Keterangan
Rp 83.000.000	APBD
Rp 84.000.000	APBD

Kajen, *Oktober* 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN,


ADITOMO HERLABANG, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680517 198903 1 009

Pihak Pertama,
SUB KOORDINATOR DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN


MOSH AULIA HAKIM, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19830124 201001 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERNIYANTI, SH.M.Par
Jabatan : Sub Koordinator Perundang-Undangan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ADITOMO HERLAMBANG, SH
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan
Seiaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN

SUB KOORDINATOR PERUNDANG-
UNDANGAN BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680517 198903 1 009

HERNIYANTI, SH, M.Par
Penata Tk. I
NIP. 19820213 200604 2 025

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR PERUNDANG-UNDANGAN
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**


No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang
2	Subkegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun	3 Dokumen

Sub Kegiatan

- | | | | | | |
|---|--|----|-------------|----------|------------|
| 1 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Rp | 13.770.000 | Anggaran | Keterangan |
| 2 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Rp | 186.349.500 | Anggaran | APBD |

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN,



ADITOMO HERLAMBAANG, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680517 198903 1 009

Pihak Pertama,
KASUBBAG. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN



HERNIYANTI, SH., M.Par
Penata Tingkat I
NIP. 19820213 200604 2 025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WINARTININGSIH, SH
Jabatan : Sub Koordinator Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan
Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ADITOMO HERLAMBANG, SH
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pekalongan
Seiaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai iampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN

SUB KOORDINATOR BANTUAN
HUKUM BAGIAN HUKUM SETDA
KAB. PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBANG, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19880517 198903 1 009


WINARTININGSIH, SH
Penata Muda Tk. I
NIP. 19830618 201502 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR BANTUAN HUKUM
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

No.	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah kasus Yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum Pemenuhan data laporan aksi HAM dan penilaian Peduli HAM	40 Kasus 4 dokumen

Keterangan
APBD

Sub Kegiatan
Subkegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Anggaran
Rp 402.180.500,00

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Kedua,
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN,

Pihak Pertama,
SUB KOORDINATOR BANTUAN HUKUM
BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PEKALONGAN



ADITOMO HERLAMBANG, SH
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680517 198903 1 009



WINARTINGSIH, SH
 Penata
 NIP. 19830618 201502 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRI MURWATI, SH
Jabatan : Kepala Sub Bagian Protokol
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Kab. Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : R. HANDY ARTAWAN, S.KEP, M.M
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Kab. Pekalongan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak kedua

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KAB. PEKALONGAN

R. HANDY ARTAWAN, S.KEP, M.M
Pembina Tk.I
NIP. 19770422 199702 1 001

Pihak pertama

KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL
BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KAB. PEKALONGAN

TRI MURWATI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19740710 199403 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. PEKALONGAN**

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	1 laporan
2	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	1 laporan
3	Penyediaan Dana Penunjang dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima dana penunjang dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah	9 orang/bulan

No. SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1 Fasilitasi Keprotokolan	125.000.000	APBD
2 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	800.000.000	APBD
3 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.243.605.000	APBD

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KAB. PEKALONGAN**

R. HANDY ARTAWAN, S.KEP. M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19770422 199702 1 001

Pihak Pertama,

**KEPALA SUB BAGIAN PROTOKOL BAGIAN
PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KAB. PEKALONGAN**

TRI MURWATI, SH.

Penata Tk. I

NIP. 19740710 199403 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROBBY DARUSSALAM, S.STP.
Jabatan : Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan
Bagian Protokot dan Komunikasi Pimpinan
Setda Kab. Pekalongan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : R. HANDY ARTAWAN, S.KEP, M.M
Jabatan : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setda Kab. Pekalongan

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kajen, **Oktober** 2022

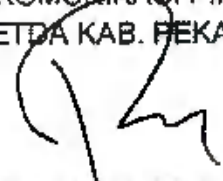
Pihak kedua

Pihak pertama

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KAB. PEKALONGAN

SUB KOORDINATOR KOMUNIKASI
PIMPINAN BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KAB. PEKALONGAN


R. HANDY ARTAWAN, S.KEP, M.M
Pembina Tk.I


ROBBY DARUSSALAM, S.STP.
Penata Tk.I

NIP. 19770422 199702 1 001

NIP. 19950227 201708 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. PEKALONGAN

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	1 laporan

No. SUB KEGIATAN

- 1 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

ANGGARAN KETERANGAN
500.000.000 APBD

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKASI PIMPINAN
SETDA KAB. PEKALONGAN



R. HANDY ARTAWAN, S.KEP. M.M
Pembina Tk.I

NIP. 19770422 199702 1 001

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR KOMUNIKASI PIMPINAN
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI
PIMPINAN

SETDA KAB. PEKALONGAN



ROBBY DARUSSALAM, S.STP.
Penata Muda Tk.I

NIP. 19950207 201708 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARI RACHMAWATI, S.IP

Jabatan : Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KISTORO, SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Seiaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, *Dktober* 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR
ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN,


KISTORO, SE, MM.
Penata Tingkat I
NIP. 19750503 201001 1 001


ARI RACHMAWATI, S.IP
Penata Tingkat I
NIP. 19710225 199303 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen

NO. SUB KEGIATAN
 1. Pengelolaan Administrasi Kewilayahan

ANGGARAN
 Rp. 180.000.000,-

KETERANGAN
 APBD

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,**

KISTORO, SE, MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750503 201001 1 001

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Pertama,

**SUB KOORDINATOR
 ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN,**

ARI BACHMAWATI, S.I.P
 Penata Tingkat I
 NIP. 19710225 199303 2 004



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MELATI MAHARANI, ST, MM

Jabatan : Suh Koordinator Administrasi Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Sekreferiat Daerah Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KISTORO, SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pembedan penghargaan dan sanksi.

Kajen, *Oktober* 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN,


KISTORO, SE, MM.

Penata Tingkat I

NIP. 19750503 201001 1 001



MELATI MAHARANI, ST, MM

Penata Tingkat I

NIP. 19800409 200902 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	1 Dokumen

NO. SUB KEGIATAN
 1. Penataan Administrasi Pemerintahan

ANGGARAN
 Rp. 195.000.000,-

KETERANGAN
 APBD

Pihak Kedua,


**KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
 SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,**


KISTORO. SE. MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19750503 201001 1 001

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Pertama,

**SUB KOORDINATOR
 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN,**


MELATI MAHARANI, ST, MM
 Penata Tingkat I
 NIP. 19800409 200902 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NAILATUL HASANAT, S.Sos

Jabatan : Sub Koordinator Kerjasama dan Otonomi Daerah Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : KISTORO, SE, MM

Jabatan : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,


KISTORO, SE, MM.
Penata Tingkat I

NIP. 19750503 201001 1 001

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR
KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN,


NAILATUL HASANAT, S.Sos
Penata

NIP. 19770325 200902 2 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
BAGIAN BAGIAN TATA PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4 4 Dokumen
2	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	15 Dokumen
3	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen

NO.	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Rp. 270.000.000,-	APBD
2.	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Rp. 130.000.000,-	APBD
3.	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Rp. 30.000.000,-	APBD

Kajen, **October** 2022

Pihak Kedua,

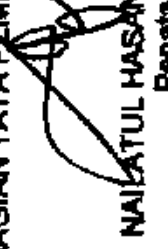
Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

SUB KOORDINATOR
KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN,


KISTORO, SE, MM
 Penata Tingkat I

NIP. 19750503 201001 1 001


NAJATUL HASANAT, S.Sos
 Penata

NIP. 19770325 200902 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMAD ZURITTAQI, S.H.I., M.H
Jabatan : Suh Koordinator Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUBAGYO, S.H., M.M
Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2022

Pihak Kedua,

KABAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KAB. PEKALONGAN

SUBAGYO, S.H., M.M
Pembina Tk. I
NIP. 19660620 199402 1 001

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR FASILITASI
PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

MUHAMAD ZURITTAQI, S.H.I., M.H
Penata TK.I
NIP. 19751226 201001 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAN TEGUH WIBOWO, SH., MH

Jabatan : Sub Koordinator Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUBAGYO, S.H., M.M

Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KABAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT
SETDA KAB. PEKALONGAN

SUB KOORDINATOR PELAKSANAAN KEBIJAKAN,
EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT
KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT

SUBAGYO, S.H., M.M
Pembina TK I

NIP. 19660620 199402 1 001

IMAN TEGUH WIBOWO, SH., MH
Pembina

NIP. 19750725 199603 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. PEKALONGAN**

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen
2.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	2. Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Tranribum Linmas	4 Dokumen

NO. SUB KEGIATAN

1. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
2. Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. PEKALONGAN

SUBAGYO, S.H., M.M
Pembina TK I

NIP. 19660620 199402 1 001

ANGGARAN

Rp. 10.490.635.000,-

Rp. 1.149.000.600,-

KETERANGAN

APBD

APBD

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Pertama,

SUB-KOORDINATOR PELAKSANAAN KEBIJAKAN EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

IMAN TEGUH WIBOWO, SH., MH
Pembina

NIP. 19750725 199603 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUTA'ALI, S.E., M.M.

Jabatan : Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HERI PANCASILARDI, SE., MM.

Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, *October* 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SUB KOORDINATOR PEMBINAAN DAN ADVOKASI
PENGADAAN BARANG DAN JASA
DAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA**

HERI PANCASILARDI, S.E., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650601 199303 1 020

MUTA'ALI, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19760604 190803 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	1. Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	170 Orang
2.	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	2. Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen

NO. SUB KEGIATAN

1. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
2. Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

ANGGARAN

- Rp 21.310.000
 Rp 225.000.000

KETERANGAN

- APBD
 APBD

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN PENGADAAN
 BARANG DAN JASA SETDA
 KABUPATEN PEKALONGAN**

HERI PANCASILARDI, S.E., M.M.
 Pembina Tingkat I

NIP. 19711225 199803 1 009

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Pertama,

**SUB KOORDINATOR PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN
 BARANG DAN JASA DAN PENGELOLAAN LAYANAN
 PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**

MUTA'ALI, S.E., M.M.
 Pembina

NIP. 19760604 199803 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cipto Hadi Prayitno, S.ST
Jabatan : Sub Koordinator Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten
Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HERI PANCASILARDI, SE., MM.
Jabatan : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten
Pekalongan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, *Oktober* 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN

SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAGIAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA

HERI PANCASILARDI, S.E., M.M.

CIPTO HADI PRAYITNO, S.ST

Pembina Tingkat I

Penata Tk. I

NIP. 19650601 199303 1 020

NIP. 19750204 199903 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	150 Dokumen

NO. SUB KEGIATAN

ANGGARAN

KETERANGAN

1. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Rp 332.791.000

APBD

Pihak Kedua,

Kajen,

Oktober

2022

Pihak Pertama,


KEPALA BAGIAN PENGADAAN
BARANG DAN JASA SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN

SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA


HERI PANCASILARDI, S.E., M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19711225 199803 1 009


CIPTO HADINPRAYITNO, S.ST.

Penata Tk. I

NIP. 19750204 199903 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIAH YUNIARTI, S.T.

Jabatan : Sub Koordinator Penyusunan Program Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN,

EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.
Pembina Tk. I

NIP. 19711225 199803 1 009

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR PENYUSUNAN
PROGRAM BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN,

DIAH YUNIARTI, S.T.
Penata Tk. I

NIP. 19810605 200604 2 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen


NO. SUB KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp. 30.000.000 APBD

Kajen, **October** 2022


Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
 PEMBANGUNAN SETDA
 KABUPATEN PEKALONGAN,**


EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.
 Pembina Tk. I
 NIP. 19711225 199803 1 009

Pihak Pertama,

**SUB KOORDINATOR PENYUSUNAN
 PROGRAM BAGIAN ADMINISTRASI
 PEMBANGUNAN,**


DAH YUNIARTI, S.T.
 Penata Tk. I
 NIP. 19810605 200604 2 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARDIANI PRABAKTI, S.T.

Jabatan : Sub Koordinator Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Kedua,

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN,


EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.
Pembina Tk. I
NIP. 19711225 199803 1 009

Pihak Pertama,

SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,


HARDIANI PRABAKTI, S.T.
Penata Tk. I
NIP. 19811104 200901 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ISMAIL NUR HIDAYAT, S.T.

Jabatan : Sub Koordinator Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Pekalongan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.

Jabatan : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Kajen, **Oktober** 2022

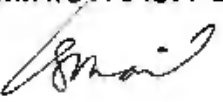
Pihak Kedua,

Pihak Pertama

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDA
KABUPATEN PEKALONGAN,

SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,


EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.
Pembina Tk. I
NIP. 19711225 199803 1 009


ISMAIL NUR HIDAYAT, S.T.
Penata Tk. I
NIP. 19810619 200604 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO.	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	12 Laporan

NO. SUB KEGIATAN SUB KEGIATAN ANGGRAN KETERANGAN

1. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Rp. 70.000.000,- APBD

Pihak Kedua,

**KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI
 PEMBANGUNAN SETDA
 KABUPATEN PEKALONGAN,**



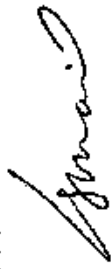
EKA IMAN PRABAWA, S.H., M.Eng.
 Pembina Tk. I

NIP. 19711225 199803 1 009

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Pertama

**SUB KOORDINATOR PENGENDALIAN DAN
 EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN
 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN,**



ISMAIL NUR HIDAYAT, S.I.
 Penata Tk. I

NIP. 19810619 200604 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANJAR ARDIANSYAH, ST

Jabatan : Sub Koordinator Sumber Daya Alam

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TOHARNO, S.Sos., M.Si

Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, *Oktober* 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA ALAM
BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

TOHARNO, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19650127 198509 1 001

ANJAR ARDIANSYAH, ST

Penata Tk. I

NIP. 19761106 200801 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA ALAM
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO (1)	SUB KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	4 Dokumen
2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	2 Dokumen

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Rp. 35.800.000	APBD
2. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Rp. 331.924.200	DBHCHT
Jumlah	Rp. 367.724.200	

Kajon, *Oktober* 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN**

**SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA ALAM
BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN**



TOHARNO, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19650127 198509 1 001



ANJAR ARDIANSYAH, ST

Renate Tk. I

NIP. 19761106 200801 1 006



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RETNO SUKIYATININGSIH, SE.,M.Ak
Jabatan : Sub Koordinator Pembinaan BUMD dan BLUD dan Perekonomian
Setda Kab. Pekalongan

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : TOHARNO, S.Sos., M.Si
Jabatan : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pekalongan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, *Oktober* 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

SUB KOORDINATOR PEMBINAAN BUMD
DAN BLUD DAN PEREKONOMIAN
BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

TOHARNO, S.Sos., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19650127 198509 1 001

RETNO SUKIYATININGSIH, SE.,M.Ak

Penata Muda Tk. I

NIP. 19810827 200901 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR PEMBINAAN BUMD DAN BLUD DAN PEREKONOMIAN
BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen
2.	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan

Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Rp. 275.000.000	APBD
2. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Rp. 90.000.000	APBD
Jumlah	Rp. 365.000.000	

Kajen, **Oktober** 2022

Pihak Kedua,

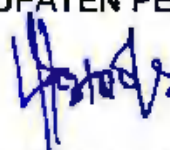
Pihak Pertama,

**KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN**

**SUB KOORDINATOR PEMBINAAN BUMD
DAN BLUD DAN PEREKONOMIAN
BAGIAN PEREKONOMIAN
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN**



TOHARNO, S.Sos., M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650127 198509 1 001



RETNO SUKIYATININGSIH, SE., M.Ak
Penata Muda Tk. I
NIP. 19810827 200901 2 005



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : MAIMUNAH, SH.
Jabatan : Kepala Subbag. Rumah Tangga dan Perlengkapan
Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHERMAN, SE, MM
Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, *Oktober* 2022

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KAB. PEKALONGAN**

SUHERMAN SE, MM
Pembina
NIP. 19660910 198903 1 011

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUBBAG. PERALATAN
DAN PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM
SETDA KAB. PEKALONGAN**

MAIMUNAH, SH
Penata
NIP. 19730517 199603 2 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB BAGIAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
BAGIAN UMUM SETDA KAB. PEKALONGAN**

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket
5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	160 Unit
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	8 Unit
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit
10	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	50 Paket
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	95 unit
12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
13	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 laporan

No. KEGIATAN

ANGGARAN KETERANGAN

1	Fasilitas Kunjungan Tamu	1.120.000.000	APBD
2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	75.000.000	APBD
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	366.300.000	APBD
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	245.000.000	APBD
5	Pemeliharaan Mebel	100.000.000	APBD
6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	315.268.800	APBD
7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	750.000.000	APBD
8	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	596.103.000	APBD
9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.017.672.000	APBD
10	Pengadaan Mebel	375.615.000	APBD
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.026.416.000	APBD

12	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.261.784.200	APBD
13	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	895.000.000	APBD
14	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	284.431.000	APBD

Kajen, Oktober 2022

**PIHAK KEDUA,
KEPALA BAGIAN UMUM
SETDA KAB. PEKALONGAN**



SUHERMAN SE, MM
Pembina

NIP. 19680910 199603 1 011

**PIHAK PERTAMA,
KEPALA SUBBAG. RUMAH TANGGA
DAN PERLENGKAPAN BAGIAN UMUM
SETDA KAB. PEKALONGAN**



MAIMUNAH, SH
Penata

NIP. 19730517 199603 2 002



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : NENI NURHAWATI, SE.
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan
Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHERMAN SE, MM
Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, *Oktober* 2022

**PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM SETDA
KAB. PEKALONGAH**

SUHERMAN SE, MM
Pembina
NIP. 19680910 198903 1 011

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN
BAGIAN UMUM SETDA
KAB. PEKALONGAN**

NENI NURHAWATI, SE.
Penata Tk. I
NIP. 19841210 201001 2 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

SUBBAG. KEUANGAN

BAGIAN UMUM SETDA KAB. PEKALONGAN

NO.	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	144 Orang/ Bulan
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan

No. SUB KEGIATAN

ANGGARAN KETERANGAN

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

16.287.666.000

APBD

2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

895.000.000

APBD

Kajen, Oktober 2022

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

**KEPALA BAGIAN UMUM SETDA
KAB. PEKALONGAN**

**KEPALA SUBBAG. KEUANGAN
BAGIAN UMUM SETDA
KAB. PEKALONGAN**



SUHERMAN SE, MM
Pembina

NENI NURHAWATI, SE.
Penata Tk. I

NIP. 19680910 198903 1 011

NIP. 19841210 201001 2 029



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : WULUNGSARI MEDYARINI, SE
Jabatan : Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan,
Staf Ahli dan Kepegawaian
Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUHERMAN SE, MM
Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kab. Pekalongan

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan penoapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, Oktober 2022

**PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM SETDA
KAB. PEKALONGAN**

**PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN TU PIMPINAN,
STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN UMUM SETDA
KAB. PEKALONGAN**

SUHERMAN SE, MM
Pemhina
NIP. 19680910 198903 1 011

WULUNGSARI MEDYARINI, SE
Penata
NIP. 19760828 201101 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN UMUM SETDA KAB. PEKALONGAN

NO	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
3	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 Dokumen
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan

No.	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000	APBD
2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600.000.000	APBD
3	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	29.659.500	APBD

4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	107.574.000	APBD
5	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	383.910.000	APBD
6	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	90.000.000	APBD
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000	APBD
8	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.777.100.000	APBD
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.161.515.000	APBD

Kajen, Oktober 2022

PIHAK KEDUA
KEPALA BAGIAN UMUM SETDA
KAB. PEKALONGAN



SUHERMAN SE, MM
Pembina
NIP. 19680910 198903 1 011

PIHAK PERTAMA
KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA PIMPINAN,
STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN
BAGIAN UMUM SETDA KAB. PEKALONGAN



WULUNG SARI MEDYARINI, SE
Penata
NIP. 19760828 201101 2 009



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUCIPTO. S.IP

Jabatan : Sub Koordinator Kinerja Reformasi Birokrasi

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P

Jabatan : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Pekaongan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kajen, 03-01-2022

Pihak Kedua,

Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P
NIP. 19690118 198903 1 007

Pihak Pertama,

SUCIPTO. S.IP
NIP. 19660308 198503 1 001.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SUB KOORDINATOR KINERJA REFORMASI BIROKRASI**

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan kinerja sekretariat daerah yang tersusun	1 dokumen
2.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi yang tersusun	1 dokumen
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen Sakip tingkat Pemkab yang tersusun	4 dokumen

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 10.137.500	APBD
2.	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Rp. 70.000.000	APBD
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 75.000.000	APBD
	Jumlah	Rp. 155.137.500	APBD

Kajen, 04 - 01 - 2022

Pihak Kedua,


Drs. RUKMAN HIDAYAT A.P.
NIP. 19690118 198903 1 007

Pihak Pertama,


SUGIPTO, S.IP.
NIP. 19680308 198503 1 001.